

ANALISIS KORELASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2022

Binar Dwiyanto Pamungkas^{1*}, Fathona Harisma²

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: binardwiyantopamungkas@gmail.com

Article Info

Article History

Received : September 20, 2025

Accepted : November 25, 2025

Published : December 31, 2025

Keywords

Financial Capability;

Economic Growth.

Abstrak

*This study aims to analyze the correlation between regional financial capacity and economic growth in Sumbawa District in 2018-2022. The type of this study was associative. The type of data used was quantitative data. The type of data used was quantitative data obtained from secondary sources using documentation techniques. Documentation techniques were used to collect data from documents or archives held by the Central Statistics Agency regarding the Fiscal Decentralization Ratio and GRDP of Sumbawa District for 2018-2022. The collected data was processed using statistical processing software Statistical Package for The Social Science (SPSS) to be analyzed using simple linear regression analysis techniques, partial hypothesis testing (*t*-test), and determinant coefficient testing (R^2). Based on the results of data analysis, it can be concluded that regional finances do not effect economic growth in Sumbawa District in 2018-2022. The ability of the regional financial capacity to effect on the economic growth in Sumbawa District was 26,6%, while the remaining of 73,4% was effected by other variables outside this research model, such as per capita income inequality, employment and unemployment, changes in economic structure, capital accumulation, population growth, and technological progress.*

PENDAHULUAN

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah.

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sistem pemerintahan desentralisasi ini sejatinya telah membawa perubahan positif di daerah, dimana sistem desentralisasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah. Dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah, maka dana yang tersedia bagi pemerintah daerah akan bertambah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alyani & Siwi, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian daerah, maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari sumber pendapatan yang potensial sekaligus mengoptimalkan aliran sumber pendapatan asli daerah yang terkumpul selama ini.

Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan pihak lainnya hanya bersifat sementara dan pelengkap. Oleh karena itu, Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kemampuan keuangan daerah mencerminkan kapasitas pemerintah kabupaten untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi dana dari pusat, dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan keuangan ini menjadi tolok ukur kapasitas fiskal yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah (Pale, 2022).

Kemampuan keuangan daerah mencerminkan derajat desentralisasi fiskal yang dialami pemerintah daerah. Derajat desentralisasi ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan sumber dana sendiri tanpa bergantung secara penuh kepada transfer dana pusat. Tingginya derajat desentralisasi fiskal umumnya menunjukkan kemandirian fiskal yang baik. Temuan menunjukkan bahwa daerah yang mampu memaksimalkan potensi desentralisasi fiskal umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada dana pusat sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai target pembangunan (Purwadinata *et al.*, 2022).

Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya secara efektivitas dan efisiensi. Kemampuan keuangan daerah bukan semata ukuran besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, baik dari sisi belanja maupun penerimaan, memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa belanja publik memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu komponen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah (Jannah *et al.*, 2022).

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi lokal, produktivitas sektor unggulan, serta kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka hubungan antara kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat linear, karena kapasitas fiskal yang tinggi saja tidak cukup tanpa adanya tata kelola yang baik. Faktor seperti perencanaan anggaran yang matang, akuntabilitas penggunaan dana, serta kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan memegang peranan penting. Dalam beberapa kajian literatur mengenai kinerja keuangan daerah secara umum, ditemukan bahwa kinerja fiskal yang baik tidak otomatis berujung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak diikuti oleh perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Andriani, 2016).

Secara teoritis, hubungan antara kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa otonomi fiskal memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan karakteristik lokal. Desentralisasi fiskal yang efektif dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan (Fitriah dan Suryaningrum, 2023).

Kebijakan fiskal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengarahkan belanja publik pada sektor-sektor produktif agar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas fiskal yang kuat berdampak pada peningkatan pengeluaran produktif, yang kemudian merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, serta peningkatan investasi. Sebaliknya, ketidakseimbangan fiskal dapat menimbulkan stagnasi pertumbuhan atau bahkan kontraksi ekonomi lokal (Pattimau, 2024).

Efektivitas kebijakan fiskal di daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong perekonomian pada saat resesi dan tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk memperlambat perekonomian. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai (Sevianti *et al.*, 2025).

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami dinamika perekonomian sejak era otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator utama dalam menilai perkembangan ekonomi setempat. Ketika kemampuan keuangan daerah meningkat, terutama melalui peningkatan PAD dan alokasi belanja daerah untuk sektor-sektor produktif, maka hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih signifikan. Namun di sisi lain, permasalahan klasik seperti rendahnya derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta keterbatasan kapasitas fiskal masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Sumbawa untuk memaksimalkan potensi ekonominya.

Di Kabupaten Sumbawa, beberapa temuan sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih termasuk kategori rendah jika dilihat dari *share ratio* dan *growth ratio*, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk memperkuat basis fiskal daerah (Fitriyani *et al.*, 2020). Dalam konteks ini, hubungan antara kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi harus dilihat dalam kerangka kebijakan fiskal yang adaptif terhadap tantangan lokal. Misalnya, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan terhadap PAD dan produktivitas ekonomi, sehingga mempengaruhi kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan fiskal yang responsif dalam situasi seperti ini diperlukan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan (Sejati *et al.*, 2025).

Melihat dinamika di Kabupaten Sumbawa, penting untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara indikator kemampuan keuangan daerah dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Penelitian semacam ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan daerah untuk merumuskan strategi fiskal yang lebih efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi upaya penguatan kapasitas

fiskal di tingkat lokal, termasuk perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal.

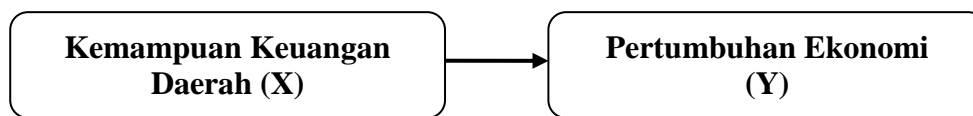
Dengan latar di atas, kajian tentang korelasi kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa menjadi sangat penting untuk memperkaya literatur ilmiah sekaligus memberikan kontribusi kebijakan nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Elvera dan Astarina (2021) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penggunaan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2022.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka desain alur penelitian ini dapat disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kemampuan keuangan daerah yang diproxikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) serta data pertumbuhan ekonomi yang diproxikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2022.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Menurut Sujarweni (2021), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bisa didapatkan dari catatan, buku, artikel, laporan keuangan, jurnal, internet, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau arsip yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada peneliti ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data-data dari peristiwa yang memang disengaja untuk dikumpulkan. Teknik dokumentasi umumnya digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar. Data sekunder yang didapat dari dokumentasi dapat menghemat waktu karena tidak perlu menyusun instrumen penelitian dan mencari sumber data. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen laporan keuangan daerah untuk memperoleh data mengenai PAD dan PDRB Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2022.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear sederhana, yaitu teknik analisis yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Teknik analisis ini regresi linear sederhana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah yang diproxikan dengan PAD (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang diproxikan dengan PDRB (Y). Selain itu, dilakukan pula pengujian hipotesis parsial (uji t), dan uji koefisien determinan (R^2). Dalam penelitian ini, data-data diolah untuk dianalisis dengan menggunakan software pengolahan statistik *Statistical Package for The Social Science (SPSS)* (Santoso, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan model regresi yang melibatkan satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana yang dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau negatif (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh kemampuan keuangan daerah yang diproxikan dengan PAD (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang diproxikan dengan PDRB (Y).

Hasil pengujian regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9532.938	1400.440		6.807	.006
Kemampuan Keuangan	4.169E-9	.000	.285	.515	.642

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$\text{Kemampuan Keuangan} = 9532.938 + 4.169 (\text{Pertumbuhan Ekonomi}) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah sebesar 9532.938. Nilai ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa apabila nilai variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan 0 (nol), maka nilai konsisten atau nilai tetap variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa (Y) adalah sebesar 9532.938.
- Nilai koefisien regresi variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) adalah sebesar 4.169 dan bernilai positif yang menunjukkan hubungan yang searah (berbanding

lurus). Artinya, apabila nilai variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat sebesar 4.169. Demikian pula sebaliknya, jika nilai variabel Kemampuan Keuangan Daerah (X) mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa (Y) juga akan menurun sebesar 4.169.

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji hipotesis parsial atau uji-t. uji hipotesis parsial atau uji-t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t statistik ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyatanya. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai probabilitas hasil perhitungan lebih kecil dari 0.05 (sig.<0.05) (Ghozali, 2021).

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh kemampuan keuangan daerah yang diproxikan dengan PAD (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang diproxikan dengan PDRB (Y). Berdasarkan pengujian hipotesis parsial (uji t) dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9532.938	1400.440		6.807	.006
Kemampuan Keuangan	4.169E-9	.000	.285	.515	.642

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 0.515, sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat derajat kebebasan ($df=n-k=5-2=3$) dan $\alpha = 5\%$ (0.05) adalah sebesar 2.353 sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($0.515 < 2.353$). Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0.642 lebih besar dari nilai maksimal taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05 ($0.642 > 0.05$). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dalam uji t, maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Artinya, PAD maupun efisiensi APBD tidak secara otomatis mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah bukan semata ukuran besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, maka kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen pada model regresi dalam mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R Squared*. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021).

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini digunakan untuk melihat serapa besar kemampuan variabel kemampuan keuangan daerah yang diproxikan dengan PAD (X) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang diproxikan dengan PDRB (Y). Berdasarkan pengujian koefisien determinasi (R^2) yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 ^a	.262	.015	13991.83541

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Keuangan
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang diindikasikan oleh nilai *R Squared* adalah sebesar 0.262. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel kemampuan keuangan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa sangat rendah, yaitu sebesar 26,6%, sedangkan sisanya sebesar 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini, seperti ketidakseimbangan pendapatan perkapita, tenaga kerja dan pengangguran, perubahan struktur ekonomi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi (Fahrudin, 2024).

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional karena diyakini mampu mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan keuangan daerah dalam hal ini memegang peranan penting sebagai tolok ukur kapasitas fiskal yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Kemampuan keuangan memegang peranan penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah dapat menjalankan kemandiriannya. Saat daerah mampu secara mandiri membiayai operasional pemerintahannya, ketergantungan terhadap pemerintah pusat cenderung menurun. Sumber daya keuangan daerah menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap aktivitas pemerintahan di daerah membutuhkan pendanaan, menjadikan pengelolaan

keuangan daerah sebagai elemen krusial dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta administrasi pemerintahan daerah secara keseluruhan (Suharto & Rahman, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Saat ini, pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah sering dilakukan dengan memperhatikan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsipnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan PAD tidak berarti daerah harus bersaing untuk membuat pajak baru, tetapi daerah harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi sumber pendapatan yang ada. Ketidakkampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pendapatan yang ada dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah (Denisa & Nasution, 2025).

Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan keuangan ini menjadi tolok ukur kapasitas fiskal yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari sumber pendapatan yang potensial sekaligus mengoptimalkan aliran sumber pendapatan asli daerah yang terkumpul selama ini.

Melihat dinamika perekonomian di Kabupaten Sumbawa, penting untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara indikator kemampuan keuangan daerah dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Kemampuan variabel kemampuan keuangan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa sangat rendah, yaitu sebesar 26,6%, sedangkan sisanya sebesar 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini, seperti pendapatan perkapita, tenaga kerja dan pengangguran, perubahan struktur ekonomi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun efisiensi APBD tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah bukan semata ukuran besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai.

Meskipun terdapat peningkatan PAD, Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian keuangan. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa harus sungguh-sungguh dalam menggali seluruh potensi ekonomi yang ada di daerahnya sebagai sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan aliran sumber pendapatan asli daerah yang terkumpul selama ini, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa juga harus mampu mengalokasikan dan merealisasikan pembelanjaan daerah secara optimal untuk program-program produktif sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, serta peningkatan investasi. Melalui kebijakan ini akan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada. Daerah yang mampu memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada di daerahnya akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Sebaliknya, daerah yang tidak mampu memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada di daerahnya dan masih bergantung pada dana pusat akan menghadapi kesulitan dalam mencapai target pembangunan daerahnya. Mengingat sumber dana dari pemerintah pusat yang terbatas, maka hal ini akan menghambat realisasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisak *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, yang disebabkan tidak efektifnya pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada sektor tertentu seperti pajak properti atau pajak hotel dan restoran. Selain itu, kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, disebabkan tidak efisiennya dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah, seperti penyalahgunaan dana atau investasi untuk sektor-sektor yang tidak produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Artinya, peningkatan PAD maupun efisiensi APBD tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah bukan semata ukuran besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai.
2. Kemampuan variabel kemampuan keuangan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa sangat rendah, yaitu sebesar 26,6%, sedangkan sisanya sebesar 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini, seperti ketidakseimbangan pendapatan perkapita, tenaga kerja dan pengangguran, perubahan struktur ekonomi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.

SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka saran yang dapat penulis diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensif maupun secara ekstensif. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan

cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan pembanding sekaligus pelengkap penelitian ini, dan untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti ketidakseimbangan pendapatan perkapita, tenaga kerja dan pengangguran, perubahan struktur ekonomi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyani, F., & Siwi, M.K. (2020). Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 3(2): 212-222.
- Andriani, S. (2016). Dampak Otonomi Daerah: Realisasi Perencanaan Keuangan Kabupaten Sumbawa Dengan Terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, 1(2), 41-49.
- Denisa, N., & Nasution, D. A. D. (2025). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(2), 124-137.
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian (Ed. 1., Cet. 1.)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fahrudin, F. (2024). Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Konsep, Indikator, Dan Pendekatan Pengukuran. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1375-1384.
- Fitriah, L. D., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran mediasi pertumbuhan ekonomi pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1), 152-164.
- Fitriyani, I., Fietroh, M. N., & Asmini. (2020). Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 173-180.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jannah, M., Kurniawansyah, & Ismawati. (2022). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 342-350.
- Ma'ruf, M. R., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan fiskal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346-356.



- Nisak, Z., Rasyidin, M., Rizkina, A., & Rizal, M. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 5(5), 312-320.
- Pale, M. Y. (2022). Strategi kebijakan fiskal pemerintahan daerah Kabupaten Malang dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. *Rinjani: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-67.
- Pattimau, A. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal di Pemerintah Kota Kupang. *Defis: Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah*, 15(1), 28-49.
- Purwadinata, S. P., Susmawati, D., & Sumbawati, N. K. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 351-361.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A.A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Santoso, S. (2020). *Panduan Lengkap SPSS 26*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sejati, M. A., Haryani, P., Manalu, T. J., Rahmawati, A., & Ginting, F. A. (2025). Analisis Kondisi Dan Distribusi Potensi Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Geografi*, 21(1), 23-42.
- Sevianti, S., Darmawati, D., Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan Kebijakan Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 4196-4207.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, A., & Rahman, A. (2021). Regional Financial Capacity and Its Impact on Local Autonomy: An Indonesian Case Study. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 45–60.
- Sujarweni, V.W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.